

Katalog : 4601009.53

# RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2009 - 2016



**RINGKASAN  
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
2009 - 2016**



# **RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2009-2016**

**ISSN** : 2528-2131  
**Katalog** : 4601009.53  
**No. Publikasi** : 53520.1801  
**Jumlah Halaman** : viii + 32 Halaman  
**Ukuran buku** : 21 cm x 29,7 cm

**Naskah** : Bidang Statistik Sosial  
**Penyunting** : Bidang Statistik Sosial  
**Gambar Kulit** : Bidang Statistik Sosial  
**Diterbitkan oleh** : ©BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Dicetak oleh** : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# **TIM PENYUSUN**

## **RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2009-2016**

### **Pengarah :**

Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

### **Penanggung Jawab :**

Ir. Desmon Sinurat

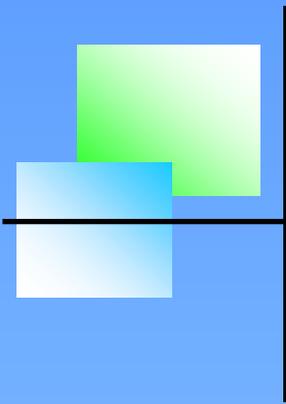
### **Penyunting :**

Alberth Christian Lulan, SST, M.Si

### **Penulis :**

Dewi Rara, SST





## Kata Pengantar

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009 dan sekaligus sebagai *benchmark* penyusunan IDI. Oleh karena itu, publikasi ini berupaya menyajikan data IDI sejak 2009 hingga tahun 2016 agar dapat melihat perkembangan IDI sesuai komponen IDI 2009 sekaligus melihat perubahan dua indikator sejak tahun 2015 sebagai upaya penyempurnaan penyusunan IDI. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia dikoordinir oleh Bappenas, didukung oleh UNDP, Kemendagri, BPS dan Bappeda.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui *review* surat kabar dan *review* dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Terbitnya buku ini semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Ringkasan IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2016 disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kupang, Januari 2017  
Kepala BPS Provinsi NTT



Maritje Pattiwaellapia  
NIP. 19661116 198901 2 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
- Apakah IDI itu.....	1
- Tujuan dan Metodologi Pengumpulan data IDI.....	2
- Tahapan Penghitungan IDI.....	3
- Review Surat Kabar dan Dokumen.....	4
- Focus Group Discussion (FGD).....	5
- Wawancara Mendalam (In-dept Interview).....	6
- Aspek, Variabel dan Indikator IDI.....	7
- Perkembangan IDI di NTT 2009-2016.....	8
- Perkembangan Nilai Indeks setiap Aspek.....	9
- Perkembangan Nilai Indeks setiap Variabel.....	11
- Perkembangan Skor Indikator –Indikator Aspek Kebebasan Sipil.....	14
- Perkembangan Skor Indikator –Indikator Aspek Hak-Hak Politik.....	17
- Perkembangan Skor Indikator –Indikator Aspek Lembaga Demokrasi.....	21
- Keterbandingan IDI NTT Tahun 2015-2016.....	24
- Lampiran .....	25



Apakah IDI itu?

## Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

*“Indikator komposit yang mengukur kondisi demokrasi provinsi dan menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia”*

### Prinsip Dasar Penyusunan IDI

- IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi
- IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi; bukan suatu studi etnografis yang sangat detil yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi
- IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat
- IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, sejahtera

- IDI sebagai alat ukur objektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia

- Konsep Demokrasi maupun metode pengukurannya, mempertimbangkan kekhasan persoalan yang ada Indonesia

Dua karakteristik utama dari praktik demokrasi diantaranya:

1. Pertama: telah terjadi perluasan peran masyarakat (society)
2. Kedua: reformasi kelembagaan demokrasi telah dilakukan secara massif, tidak saja dalam bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi juga menghadirkan sejumlah lembaga baru

## Tujuan Penghitungan IDI

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari hasil tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang diteliti. Dengan demikian, pengukuran ini akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi. Hasil ini akan bermanfaat untuk beberapa hal, *pertama*, hasil dari pengukuran IDI dapat membantu para akademisi mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. *Kedua*, bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, khususnya pada aspek atau variabel atau indikator yang masih kurang.

## Metode Pengumpulan Data IDI

IDI menggunakan metode triangulasi yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang akan didapat dari metode yang lain.

Metode pengumpulan data dikelompokkan dalam 2 pendekatan yaitu :

### ❑ **Pendekatan kuantitatif**

Pendekatan kuantitatif dikumpulkan melalui review surat kabar dan review dokumen, sebagai rujukan awal dan sumber data utama.

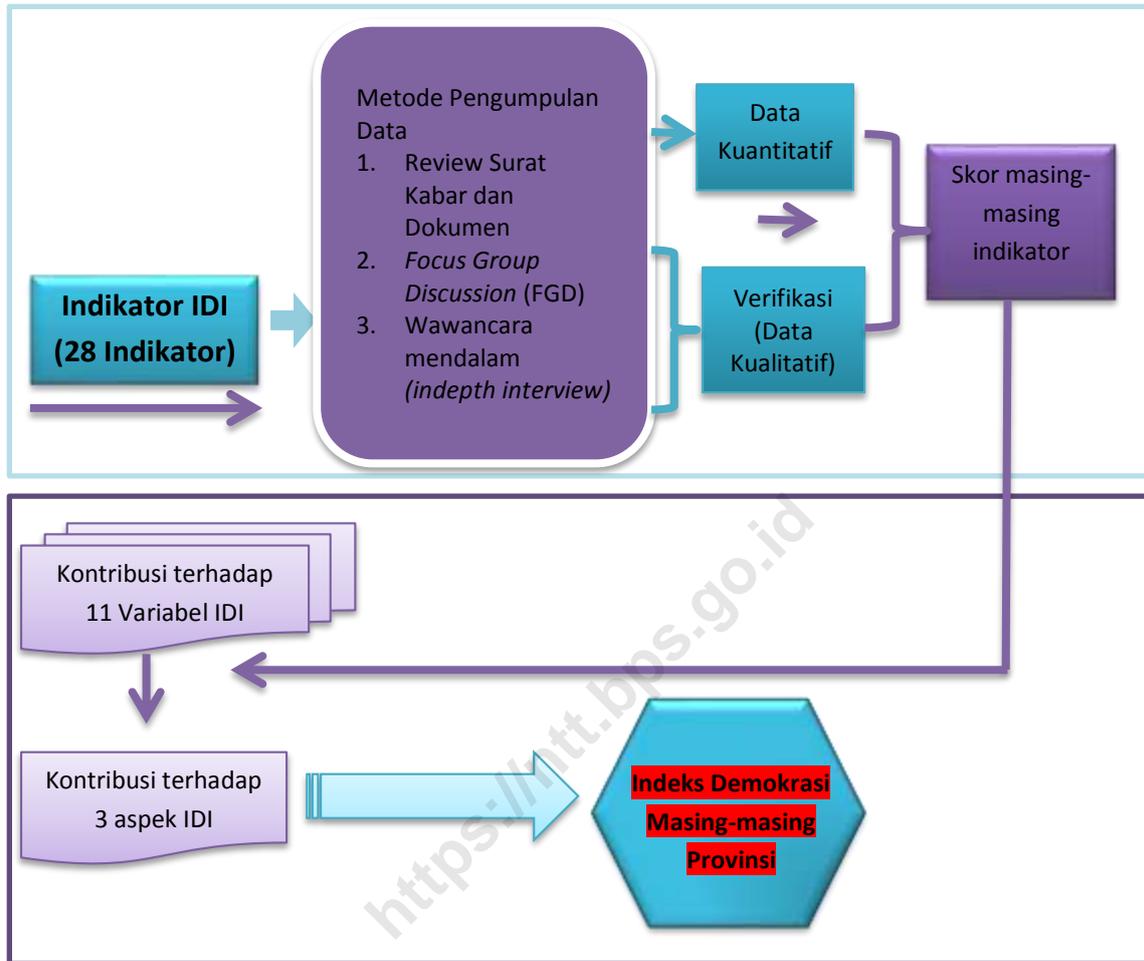
### ❑ **Pendekatan kualitatif**

Pendekatan kualitatif dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam (WM).



## TAHAPAN PENGHITUNGAN IDI

Gambar 1. Alur Penghitungan IDI



### Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja demokrasi digunakan skala 0-100. Skala tersebut dibagi dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu:

- Baik, lebih besar dari 80
- Sedang antara 60 sampai dengan 80
- Buruk, lebih kecil dari 60

## Review Surat Kabar dan Review Dokumen

### Review Surat Kabar

Dalam melakukan review surat kabar, terlebih dahulu ditentukan salah satu surat kabar terpilih di setiap provinsi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan surat kabar diantaranya independensi dan oplah terbesar. Surat Kabar yang saat ini memenuhi hal tersebut adalah SKH Pos Kupang pada periode 1 Januari – 31 Desember tiap tahunnya.

- Surat kabar telah dipilih sejak IDI 2007
- Ditentukan berdasarkan:
  - a. Oplah terbesar
  - b. Independensi
- IDI NTT menggunakan surat kabar harian Pos Kupang.

### Review Dokumen

- Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang masih berlaku.

contoh: perda, pergub, perbup/perwali, surat kepala dinas, dll

Catatan administrasi resmi, seperti jumlah anggota DPRD terpilih jenis kelamin dari Sekretariat Dewan, kepengurusan partai politik terpilih jenis kelamin, data kegiatan kaderisasi dari partai politik, dll.

## FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

### Tujuan FGD IDI

1. Mengkonfirmasi fakta yang terkait dengan temuan review surat kabar dan dokumen.
2. Menambah informasi terkait dengan kasus-kasus yang dianggap besar/menarik.
3. Menelusuri kasus-kasus yang relevan dan belum tercatat dalam data review surat kabar dan dokumen.

### Peserta FGD

1. Merupakan sumber data utama yang akan digali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang terkait indikator.
2. Mewakili profesi, kelompok, pengalaman, pengetahuan, jabatan, atau yang dianggap relevan lainnya.

### Pelaksanaan FGD

FGD dilaksanakan dua hari, dengan rincian:

- Hari I : Kebebasan Sipil
- Hari II : Hak-hak Politik dan Kinerja Institusi Demokrasi.

## Wawancara Mendalam (In-Dept Interview)

- Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* surat kabar dan dokumen serta FGD.
- Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya.
- Wawancara mendalam dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD.

Narasumber wawancara mendalam adalah orang-orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait indikator IDI.

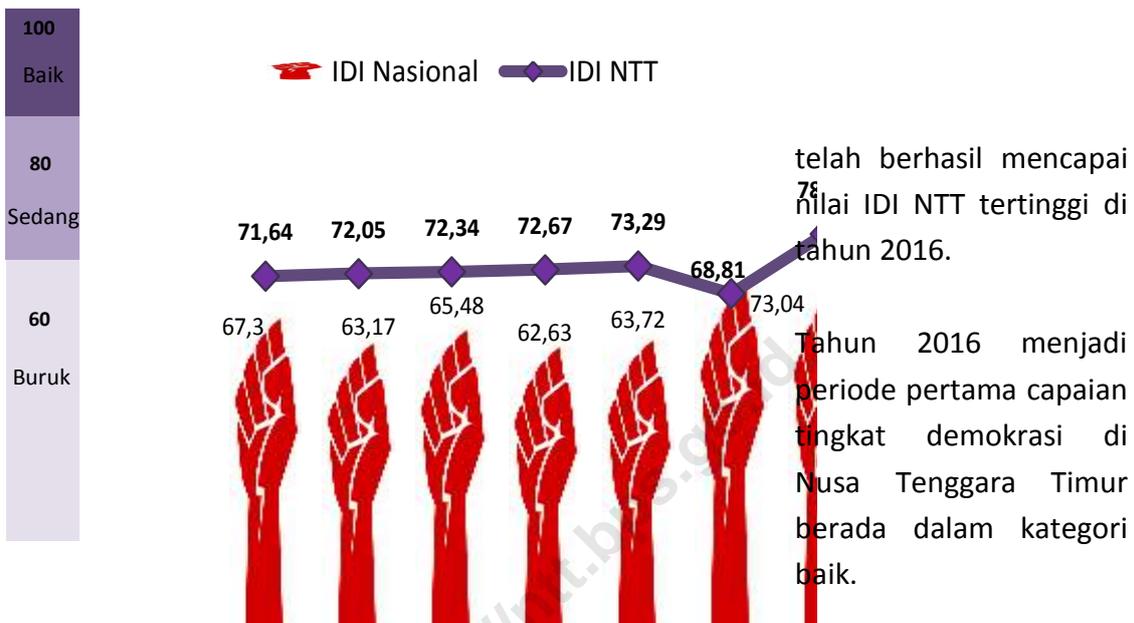
<https://ntt.bps.go.id>

## Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (3 Aspek, 11 Variabel, 28 Indikator)

Aspek	Variabel & Indikatornya	Ket
(1)	(2)	(3)
<b>ASPEK KEBEBASAN SIPIIL</b>	<b>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>	Variabel 1
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Indikator 1
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Indikator 2
	<b>Kebebasan Berpendapat</b>	Variabel 2
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	Indikator 3
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	Indikator 4
	<b>Kebebasan Berkeyakinan</b>	Variabel 3
	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agama	Indikator 5
	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	Indikator 6
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agamanya	Indikator 7
	<b>Kebebasan dari Diskriminasi</b>	Variabel 4
	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	Indikator 8
	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	Indikator 9
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	Indikator 10	
<b>ASPEK HAK-HAK POLITIK</b>	<b>Hak Memilih dan Dipilih</b>	Variabel 5
	Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	Indikator 11
	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	Indikator 12
	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	Indikator 13
	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	Indikator 14
	Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	Indikator 15
	<b>Partisipasi politik, pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan</b>	Variabel 6
	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	Indikator 16
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	Indikator 17	
<b>ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI</b>	<b>Pemilu yang bebas dan adil</b>	Variabel 6
	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	Indikator 18
	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	Indikator 19
	<b>Peran DPRD</b>	Variabel 6
	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD	Indikator 20
	Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan	Indikator 21
	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	Indikator 22
	<b>Peran parpol</b>	Variabel 6
	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	Indikator 23
	Persentase perempuan dalam kepemimpinan parpol di tingkat propinsi	Indikator 24
	<b>Peran birokrasi pemda</b>	Variabel 10
Kebijakan Pejabat Pemerintah yang dinyatakan bersalah	Indikator 25	
Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah	Indikator 26	
<b>Peradilan yang independen</b>	Variabel 11	
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	Indikator 27	
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	Indikator 28	

## Perkembangan IDI NTT Tahun 2009-2016

**Grafik 1**  
**Perkembangan IDI NTT dan IDI Nasional Tahun 2009-2016**



Sumber Data: BPS Provinsi NTT

NTT telah mencapai nilai indeks 82,49 dengan kinerja demokrasi kategori baik, sementara pada periode sebelumnya, NTT selalu berada dalam kategori sedang. Dari Grafik .1 di atas, dapat terlihat bahwa nilai IDI NTT meningkat dari tahun ke tahun dan selalu lebih tinggi dibandingkan IDI nasional, kecuali pada tahun 2014.

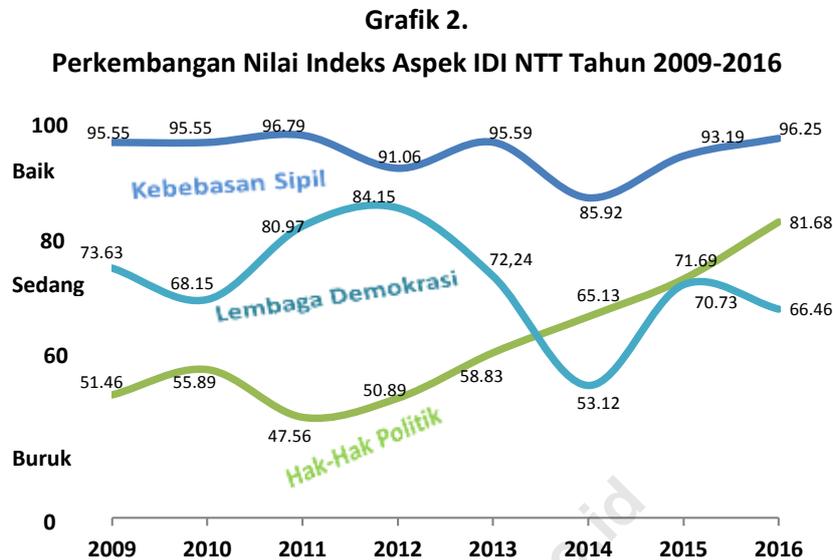
Jika melihat *trend* IDI NTT yang selalu meningkat dibandingkan dengan *trend* IDI nasional yang berfluktuasi, mencerminkan bahwa demokrasi di NTT cenderung membaik dibandingkan kondisi secara nasional. Hal ini juga diperkuat dengan perhatian pemerintah NTT terhadap kondisi demokrasi NTT dengan memasukkan IDI NTT kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Provinsi NTT merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memasukkan IDI ke dalam RPJMD. Dengan demikian, gambaran grafik di atas sejalan dengan perhatian pemerintah Provinsi NTT dalam menjadikan IDI NTT sebagai target capaian dalam RPJMD.

Kinerja demokrasi NTT dalam perspektif IDI sepanjang tahun 2009-2016, pada akhirnya

telah berhasil mencapai nilai IDI NTT tertinggi di tahun 2016.

Tahun 2016 menjadi periode pertama capaian tingkat demokrasi di Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori baik.

## Perkembangan Nilai Indeks Aspek IDI NTT Tahun 2009-2016



Sumber data: BPS Provinsi NTT

Memahami kondisi demokrasi di Provinsi NTT yang cenderung meningkat bukan hanya persoalan angka yang semakin membaik. Namun, IDI NTT juga menunjukkan perbedaan dan dinamika capaian antar aspek yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara demokrasi. Jika melihat Grafik. 2 di atas, dari ketiga aspek pembangun IDI di Provinsi NTT sepanjang tahun 2009-2016, masing-masing menunjukkan nilai indeks yang berfluktuasi, sejalan dengan demokrasi yang memang bersifat dinamis. Meskipun demikian, sedikit ada perbedaan pada aspek Hak-Hak Politik yang *trend*-nya mulai meningkat sejak tahun 2012.

Sepanjang periode 2009-2016, andil nilai Indeks Kebebasan Sipil terhadap nilai IDI NTT merupakan yang paling besar jika dibandingkan Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. Masih dalam periode waktu tersebut, dari sisi Aspek Kebebasan Sipil, nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 96,79 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 85,92. Dalam rentang nilai tersebut, menggambarkan bahwa kebebasan sipil di Provinsi NTT selalu dalam kategori baik. Ini menunjukkan terlaksananya peran negara lingkup Provinsi NTT dalam menjamin

kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan dan terbebas dari diskriminasi.

Jika melihat capaian nilai indeks Aspek Hak-hak Politik dalam Grafik 2, *trend* aspek ini mulai menunjukkan perubahan yang baik sejak tahun 2012 dengan *trend* nilai indeks yang meningkat hingga tahun 2016. Peningkatan nilai indeks tersebut menggambarkan kemajuan pesat di Provinsi NTT dalam mewujudkan hak-hak politiknya baik dari variabel hak memilih dan dipilih maupun partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai indeks dari kategori buruk selama tahun 2009-2013 dan mampu mencapai kategori baik hingga tahun 2016 ini. Nilai indeks terendah terjadi pada tahun 2011, dengan nilai indeks sebesar 47,56 dan nilai indeks tertinggi di tahun 2016 sebesar 81,68. IDI NTT telah memenuhi konsep kesetaraan Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-hak Politik yang keduanya sama-sama telah mencapai tingkatan demokrasi kategori baik.

Berbeda dengan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, di tahun 2016 nilai indeks lembaga demokrasi turun 4,27 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. *Trend* indeks ini sepanjang periode tersebut memang berfluktuasi. Bahkan nilai indeks aspek lembaga demokrasi pernah berada pada kategori buruk pada tahun 2014 dengan nilai indeks sebesar 53,12. Nilai indeks tertinggi aspek ini terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 84,15. Perlu upaya yang serius bagi lembaga-lembaga demokrasi untuk mampu setara dengan Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-hak Politik dalam mencapai tingkatan demokrasi kategori baik.

## Perkembangan Nilai Indeks 11 Variabel IDI NTT Tahun 2015-2016

**Tabel 1**  
**Nilai Indeks 11 Variabel IDI NTT Tahun 2015-2016**

No	Nama Variabel	2015	2016	Selisih
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100	100	0
II	Kebebasan Berpendapat	86,12	100	13,88
III	Kebebasan Berkeyakinan	96,52	95,01	-1,51
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	85,43	96,53	11,1
V	Hak Memilih dan Dipilih	73,82	74,24	0,42
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	69,57	89,13	19,56
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	97,47	97,47	0
VIII	Peran DPRD	37,87	38,32	0,45
IX	Peran Partai Politik	71,43	33,31	-38,1
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	51,49	65,35	13,86
XI	Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	0

*Sumber data: BPS Provinsi NTT*

Secara umum, variabel-variabel dalam IDI NTT 2016 menghasilkan nilai indeks yang bervariasi. Nilai indeks variabel tertinggi terdiri dari variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; Kebebasan Berpendapat; dan Peran Peradilan yang Independen, dengan nilai indeks masing-masing sebesar 100. Variabel ini tentunya memberi andil paling besar terhadap nilai IDI NTT yang semakin membaik.

Berbeda dengan variabel dengan capaian nilai indeks terendah dalam hasil IDI NTT 2016 yakni, variabel Peran Partai Politik, dengan nilai indeks sebesar 33,31. Variabel ini menjadi salah satu faktor penyebab turunnya nilai indeks Aspek Lembaga demokrasi. Hal ini sejalan dengan penurunan nilai indeksnya yang sangat signifikan, yakni sebesar 38,1 poin terhadap nilai indeks pada tahun 2015 (71,43). Akibatnya,

secara kualitas kinerja peran partai politik ini juga mengalami pergeseran dari kategori sedang pada tahun 2015 menjadi kategori buruk di tahun 2016 ini.

Dari tabel 1, terlihat bahwa penurunan indeks tidak hanya terjadi pada variabel Peran Partai Politik. Nilai Indeks variabel kebebasan berkeyakinan juga menunjukkan penurunan sebesar 1,51 poin. Meski demikian, hal ini tidak sampai pada penurunan nilai Aspek Kebebasan Sipil, karena andil variabel lain dalam aspek tersebut meningkat secara signifikan.

Sebagai bahan rujukan bagi penyelenggara demokrasi, khususnya bagi lembaga-lembaga demokrasi, perlu menggarisbawahi variabel yang terdapat pada tabel 1 tersebut. Dimana, terdapat dua variabel yang nilai indeksnya sangat kecil dan termasuk dalam kategori buruk, terdiri dari variabel peran DPRD dengan nilai indeks sebesar 38,32 dan variabel peran partai politik sebesar 33,31.

Meski demikian dari 11 variabel, jumlah variabel yang mengalami peningkatan nilai indeks dalam IDI NTT Tahun 2016 masih mendominasi jika dibandingkan jumlah variabel dengan nilai indeks yang mengalami penurunan. Peningkatan nilai indeks tertinggi selama tahun 2015-2016 dicapai oleh variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (meningkat 19,56 poin dari tahun sebelumnya). Selanjutnya, variabel Kebebasan Berpendapat meningkat sebesar 13,88 poin mencapai nilai indeks 100 dan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah meningkat sebesar 13,86 poin dari angka 51,49 di tahun 2015 menjadi 65,35 tahun 2016.

Peningkatan nilai indeks tertinggi pada variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan memberikan andil yang besar pada peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas pada Aspek Hak-hak Politik.

## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel Aspek Kebebasan Sipil IDI NTT Tahun 2015-2016

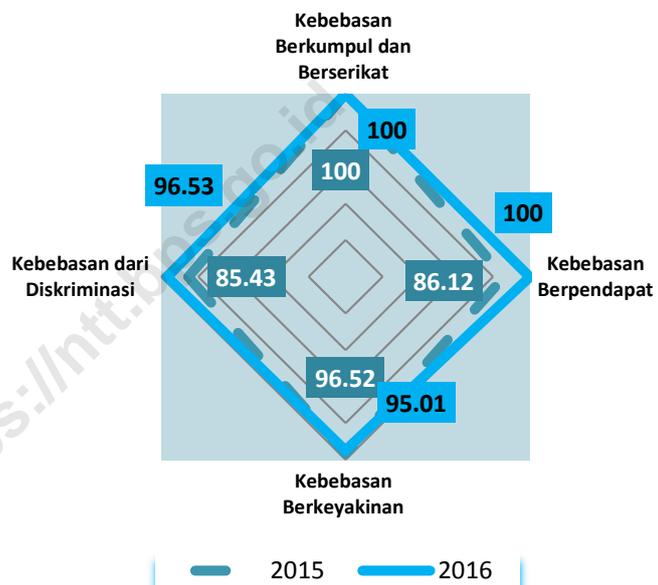
Dari Grafik 3, dapat dilihat bahwa nilai capaian indeks Aspek Kebebasan Sipil hingga tahun 2016, sebesar 96,25 disumbang oleh empat variabel yang terdiri dari Kebebasan berkumpul dan berserikat (100), Kebebasan berpendapat (100), Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (95,01), serta Kebebasan dari Diskriminasi (96,53)

Dua variabel dalam aspek kebebasan sipil mencapai nilai tertinggi selama tahun 2015-2016 adalah variabel Kebebasan berkumpul /berserikat dan Kebebasan berpendapat.

Tahun 2015-2016, variabel Kebebasan dari diskriminasi mengalami kenaikan nilai indeks sebesar 11,10 poin dari tahun sebelumnya sedangkan variabel Kebebasan berkeyakinan turun tipis 1,51 poin

Pada tahun 2016, capaian nilai indeks 100 pada variabel Kebebasan berkumpul/berserikat dan Kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa tidak ada kejadian yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat. Berbeda dengan kebebasan berkeyakinan dan kebebasan diskriminasi yang nilai indeksnya masing-masing sebesar 95,01 dan 96,53. Hal ini terjadi akibat adanya hambatan dalam menjalankan ibadah dan diskriminasi dalam melakukan kegiatan dari suatu profesi.

**Grafik 3**  
**Perkembangan Nilai Indeks Masing-masing Variabel**  
**Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2015-2016**



Sumber data: BPS Provinsi NTT

Perkembangan Skor Indikator – Indikator  
Aspek Kebebasan Sipil IDI NTT Tahun 2015-2016

**Tabel 2**  
**Nilai Skor Indikator-indikator**  
**Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2015-2016**

No.	Indikator	2015	2016	Selisih
01	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0
02	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0
03	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	83,33	100,00	16,67
04	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	0
05	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00	0
06	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	87,50	-12,5
07	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	80,00	80,00	0
08	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00	0
09	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	87,50	87,50	0
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	66,67	100,00	33,33

Sumber data: BPS Provinsi NTT

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kejadian yang menurunkan beberapa skor indikator-indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil. Menurunnya skor indikator tindakan/ pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama

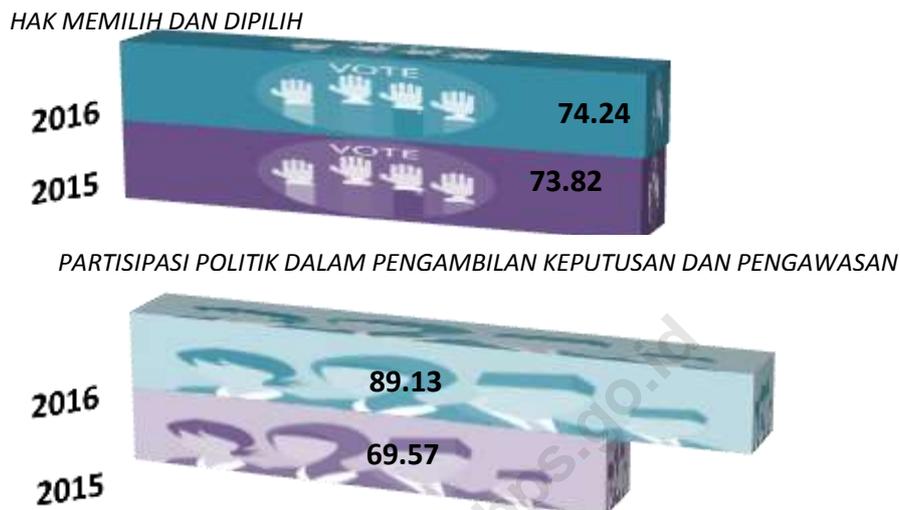
sebesar 12,50 poin disebabkan oleh kejadian yang terekam dalam media surat kabar yakni kejadian himbauan melaporkan setiap aktivitas dakwah di NTT ke MUI NTT.

Skor indikator ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama selama tahun 2015-2016 konsisten dengan nilai sebesar 80 disebabkan oleh kejadian tahun 2015 (warga mendatangi Sekretariat HTI dan meminta menurunkan papan nama HTI) dan kejadian tahun 2016 (terhambatnya aktivitas ibadah anggota Saksi Yehova karena penolakan aktivitas Saksi Yehova melalui surat pemuda GMT karena dianggap berseberangan dengan ajaran Kristen). Hal menarik terkait kasus terhambatnya aktivitas ibadah anggota Saksi Yehova, dimana beberapa narasumber FGD IDI 2016 menyampaikan bahwa protes ataupun larangan yang terjadi sebenarnya bukan persoalan anggota Saksi Yehova melakukan ibadah akan tetapi, protes karena Dirjen Binmas Kristen memasukkan Saksi Yehova sebagai lembaga keagamaan, yang bersifat gereja. Masyarakat memandang bahwa hal tersebut mencederai ajaran agama Kristen yang sangat jelas berbeda dengan ajaran Saksi Yehova. Dengan demikian, perlu adanya peran pemerintah untuk menengahi hal tersebut tanpa harus menghambat masyarakat untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya. Jika tidak, kejadian terhambatnya aktivitas ibadah Saksi Yehova ini akan terus terjadi karena secara formal, Saksi Yehova diakui sebagai lembaga keagamaan.

Begitupun dengan, skor indikator tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal etnis, gender dsb konsisten dalam kurun waktu 2015-2016 sebesar 87,50. Adanya kejadian terkait indikator tersebut pada tahun 2016 yaitu adanya kebijakan Pemkab Ende yang melarang dokter spesialis mata untuk operasi karena alasan politis. Kejadian diskriminasi ini ditelusuri melalui wawancara mendalam ketua Ikatan Dokter Indonesia yang aktif pada saat kejadian tersebut.

## Perkembangan Nilai Indeks Variabel- Variabel Aspek Hak- Hak Politik IDI NTT 2015-2016

**Grafik 4.**  
**Perkembangan Nilai Indeks Variabel Aspek Hak-hak Politik  
Tahun 2015-2016**



Sumber Data: BPS Provinsi NTT

Capaian nilai indeks kedua variabel dalam Aspek Hak-hak Politik meningkat dalam dua tahun terakhir. Variabel Hak Memilih dan Dipilih (variabel 4) meningkat 0,42 poin. Peningkatan nilai yang kecil tersebut dikarenakan perubahan skor dari Indikator Perempuan Terpilih di DPRD Provinsi (indikator 15) hanya meningkat sedikit dari tahun 2015. Empat indikator lainnya (indikator 11, 12, 13, dan 14) dalam variabel tersebut datanya konsisten dari tahun 2014 hingga tahun 2019 karena merujuk pada pemilu legislatif tahun 2014.

Masih dalam kurun waktu 2015-2016, Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (variabel 5) mengalami peningkatan nilai indeks cukup signifikan sebesar 19,56 poin yaitu dari nilai indeks sebesar 69,57 di tahun 2015 naik menjadi 89,13 pada tahun 2016. Ini berarti bahwa kinerja demokrasi

dari sisi variabel tersebut menunjukkan pergeseran tingkatan demokrasi dari kategori sedang menjadi kategori baik.

Perkembangan Skor Indikator-Indikator pada  
Aspek Hak- Hak Politik IDI NTT Tahun 2015-2016

**Tabel 3**  
**Nilai Skor Indikator-indikator**  
**Aspek Hak-hak Politik Tahun 2015-2016**

No.	Indikator	2015	2016
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	96,79	96,79
12	Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	75,14	75,14
14	Voters turnout	76,56	76,56
15	Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	30,77	35,90
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	39,13	78,26
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00

Sumber data: BPS Provinsi NTT

Nilai indeks Aspek Hak-hak politik untuk indikator 11, 12, 13, dan 14 merujuk pada pemilu legislatif tahun 2014 sehingga nilai indeksnya tetap hingga tahun 2019. Dengan demikian, IDI NTT tahun 2016 hanya mengukur indikator 15 untuk variabel Hal Memilih dan Dipilih, serta 3 indikator untuk aspek Hak-hak Politik (indikator 16 dan indikator 17).

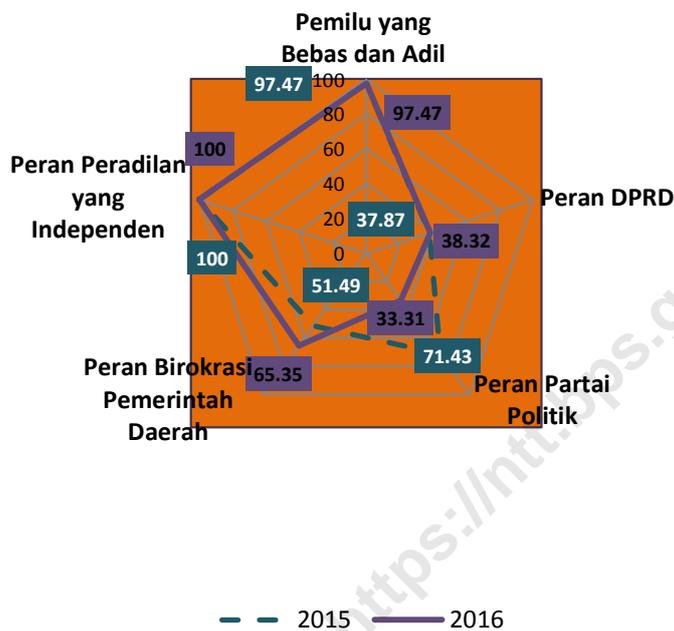
Indikator keterwakilan perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi di NTT, mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 5,13 poin pada tahun 2016, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam IDI NTT 2015, skor untuk indikator ini adalah 30,77, sedangkan dalam IDI NTT 2016, skornya sebesar 35,90. Peningkatan nilai indeks tersebut diperoleh dari peningkatan jumlah perempuan terpilih pada DPRD Provinsi dan 15 kabupaten/kota di NTT. Skor sebesar 35,90 menunjukkan bahwa jumlah

perempuan terpilih menjadi anggota DPRD masih sangat kecil dan menjadikan indikator 15 ini berada dalam kategori buruk. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa ada 5 kabupaten di NTT (Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Nagekeo) yang tidak memiliki perempuan terpilih dalam keanggotaan DPRD. Sedikitnya jumlah perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif dalam Pemilu oleh partai politik atau bisa juga karena kurangnya penghargaan para pemilih terhadap caleg perempuan sehingga rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan.

Peningkatan aspek Hak-hak Politik di tahun 2016 juga disumbang oleh peningkatan skor indikator 16 sebanyak dua kali lipat dibandingkan skor tahun 2015. Ini sejalan dengan jumlah kasus yang mengurangi skor indikator ini yakni, 10 kejadian pada tahun 2015 menurun menjadi 5 kejadian pada tahun 2016. Beberapa kejadian yang mengurangi skor indikator 16 pada tahun 2016 terdiri dari kejadian menanam batang pisang di atas badan jalan sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan; warga memalang dan memblokir jalan karena pemerintah selalu ingkar janji dalam membangun gorong-gorong; aksi pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT sebesar 100, menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat baik. Laporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui media surat kabar sebanyak 575 pengaduan (diluar pengaduan dalam bentuk hotline service) selama tahun 2016. Selain itu, dari hasil wawancara dengan perwakilan Ombudsman di NTT, juga diperoleh sekitar 500-an aduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman. Dari informasi ini, bisa disimpulkan bahwa masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara demokrasi telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik selama tahun 2015-2016.

## Perkembangan Nilai Indeks Masing-masing Variabel Aspek Lembaga Demokrasi IDI NTT 2015-2016

**Grafik 5.**  
**Perkembangan Nilai Indeks Masing-masing Variabel**  
**Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2015-2016**



Sumber data: BPS Provinsi NTT

Indeks lima Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016 terbagi dalam tiga kategori, dua variabel dalam kategori baik, satu variabel berkategori sedang, dan dua variabel berkategori buruk.

Variabel yang memiliki capaian indeks yang berkategori baik adalah variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dan Peran Peradilan Independen, masing-masing bernilai 97,47 dan 100

Variabel yang memiliki capaian indeks yang berkategori sedang adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, bernilai 65,35. Sedangkan dua variabel lainnya yang memiliki capaian nilai indeks yang berkategori buruk adalah Peran Partai Politik dan Peran DPRD.

Nilai indeks 100 selama tahun 2015-2016, pada variabel Peran Peradilan yang Independen menunjukkan bahwa independensi peran peradilan di Provinsi NTT dalam bingkai indeks demokrasi telah berhasil dilakukan. Meskipun demikian, hal ini tidak jauh melihat apakah hukum dalam peradilan sudah ditegakkan dengan seadil-adilnya

sehingga nilai indeks ini hanya melihat independensi lembaga peradilan dalam perspektif indeks demokrasi.

Dari Grafik 5 menunjukkan bahwa Kinerja Birokrasi Pemerintah di Provinsi NTT pada tahun 2016 mengalami peningkatan 13,86 poin mencapai nilai indeks 65,35 (kategori sedang), setelah tahun sebelumnya berada dalam capaian indeks dengan kategori buruk yaitu sebesar 51,49. Peningkatan nilai indeks ini dikarenakan semakin berkurangnya penyalagunaan wewenang oleh pejabat dan adanya upaya pemerintah dalam penyediaan informasi APBD sebagai bentuk transparansi anggaran.

Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam aspek Lembaga Demokrasi ini adalah variabel Peran Partai Politik dan Peran DPRD. Dari grafik 5 selama tahun 2015-2016 masih dalam capaian indeks kategori buruk, meskipun pada tahun 2016 meningkat tipis 0,45 poin menjadi 38,32 dari nilai indeks 37,87 pada tahun 2015. Kinerja DPRD Provinsi NTT masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, memperbanyak peraturan daerah (perda) hak inisiatif DPRD, dan rekomendasi kepada eksekutif sebagai fungsi pengawasan dalam pemerintahan

Perkembangan Skor Indikator- indikator  
Aspek Lembaga Demokrasi IDI NTT 2015 - 2016

**Tabel 4.**  
**Nilai Skor Indikator-indikator**  
**Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2015-2016**

No.	Indikator	2015	2016
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
20	Alokasi anggaran pendidikan	51,44	15,16
	Alokasi anggaran Kesehatan		77,49
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0	50,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	21,43	0,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	71,43	28,57
24	Perempuan pengurus partai politik	71,42	75,97
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	63,16	73,68
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	47,67	58,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber data: BPS Provinsi NTT

Aspek Lembaga Demokrasi yang terukur dalam 11 indikator menempati nilai indeks dalam rentang skor 0 - 100 pada tahun 2016. Indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi yang skornya menurun hingga skor 0 adalah indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif (indikator 22) sedangkan indikator dengan skor 100 adalah indikator Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, indikator keputusan hakim yang kontroversial (indikator 27) dan indikator penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi (indikator 28). Khusus untuk indikator 18 dan 19, variabel pemilu

yang bebas dan adil masih merujuk pada pemilu 2014 jadi skor untuk indikator tersebut konstan hingga tahun 2019.

Perkembangan indikator-indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi tahun 2015-2016, yang menarik untuk menjadi perhatian adalah lima indikator yang masih berada dalam kinerja demokrasi dengan kategori buruk diantaranya, indikator alokasi anggaran pendidikan; perda inisiatif DPRD; rekomendasi DPRD terhadap eksekutif; kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu; dan indikator baru yakni upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dengan banyaknya indikator yang masih butuh perhatian lebih karena masih dalam kinerja demokrasi kategori buruk, menjadi sebuah peringatan, bahwa keberhasilan kebebasan sipil dan Aspek Hak-hak Politik tidak didukung adanya upaya perbaikan pada kinerja lembaga demokrasi sebagai institusi yang akan menjaga kinerja demokrasi agar tidak menjadi anarki.

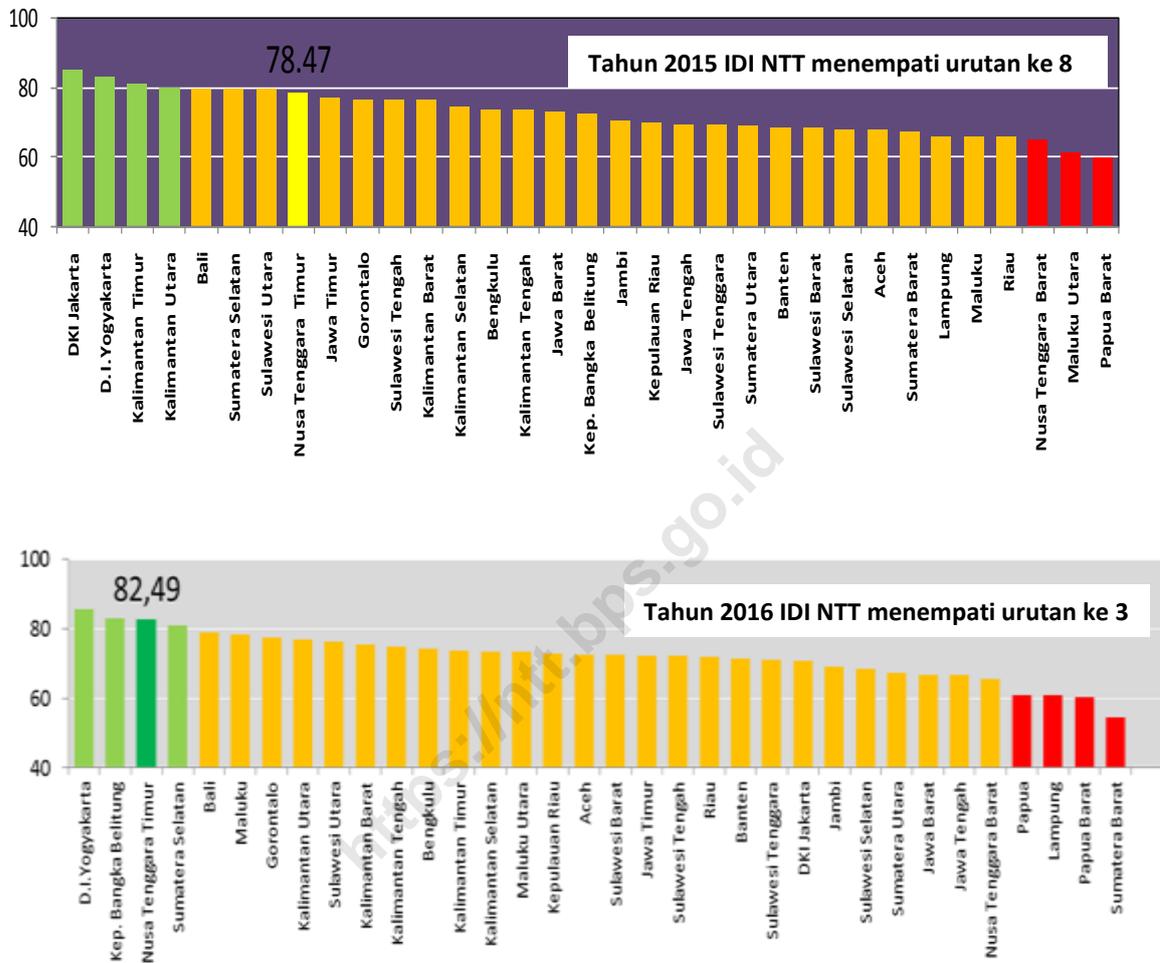
Tiga dari lima indikator dengan skor yang masih dalam kategori buruk adalah merupakan bagian dari variabel peran DPRD. Hal ini perlu menjadi koreksi bagi DPRD sebagai lembaga legislatif penyelenggara demokrasi. Dari Tabel 4, terlihat bahwa skor indikator alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2016 sebesar 15,16 sedangkan alokasi anggaran kesehatannya sebesar 77,49. Skor tersebut menunjukkan ketimpangan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Kedepannya, DPRD perlu mengalokasikan anggaran tersebut sesuai target nasional yakni 30 persen APBD untuk anggaran pendidikan dan 20 persen untuk anggaran kesehatan. Selain fungsi anggaran, DPRD juga harus menjalankan fungsi legislasinya melalui peningkatan pembentukan perda inisiatif DPRD sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat dan memahami masalah dari berbagai pemangku kepentingan serta mengetahui isu-isu terbaru. Tahun 2016, skor indikator persentase perda inisiatif yang berasal dari DPRD sebesar 50,00. Meskipun pada skor indikator ini masih dalam kategori buruk, sesungguhnya terjadi peningkatan signifikan karena sebelumnya di tahun 2015, DPRD NTT tidak membuat satu pun perda inisiatif. Untuk fungsi pengawasan DPRD yang diukur melalui skor indikator jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, belum terlaksana dengan baik hingga tahun 2016. Skor indeks

indikator tersebut sebesar 0 yang berarti bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak terlaksana. Dalam aspek ini, peran DPRD sangat penting untuk menciptakan institusi yang demokratis terutama dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Kinerja lembaga demokrasi lainnya yang perlu untuk ditingkatkan ke depannya adalah partai politik dan peran pemerintah. Dengan nilai skor indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu sebesar 28,57, partai politik yang ada di Provinsi NTT diharapkan untuk melakukan pendidikan politik (terkait etika politik, hak dan kewajiban bernegara, serta berpartisipasi yang berkualitas) dan melakukan kaderisasi, tidak hanya melalui musyawarah daerah dan rapat kerja daerah yang lebih berorientasi organisasi. Sedangkan untuk nilai skor indikator Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, sebesar 58,33 perlu kiranya pemerintah daerah meningkatkan transparansi melalui website Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang sudah terintegrasi dengan website Pemda Provinsi NTT. Mengupdate data/konten TPAD sebagai wujud keterbukaan terhadap publik terkait penggunaan anggaran pemerintah.

## Keterbandingan IDI NTT Tahun 2015-2016

**Grafik 6. Keterbandingan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia  
Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2016**



Sumber Data: BPS Provinsi NTT

Indikator-indikator dan penghitungan IDI di masing-masing provinsi bisa saja dibandingkan antar provinsi. Jika dilihat dari Grafik 6, nilai IDI NTT pada tahun 2016 telah mencapai nilai indeks sebesar 82,49 dan berada pada urutan ke tiga setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun, pada tahun 2015, nilai indeks mencapai 78,47 dan berada pada urutan ke delapan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2015-2016 IDI NTT tidak hanya mengalami peningkatan nilai indeks (sebesar 4,02 poin) akan tetapi kinerja demokrasi juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan pergeseran dari kategori sedang menjadi kategori baik, dan juga meningkatkan urutan/peringkat IDI dalam keterbandingan dengan provinsi lain dari urutan kedelapan menjadi urutan ketiga.

**Tabel 1. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2009**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	Kalteng	77.63	98.45	60.50	78.69
2	Riau	75.85	93.14	65.40	70.68
3	DKI Jakarta	73.91	91.65	52.20	86.09
4	Kep. Riau	73.61	96.22	59.47	67.62
5	Gorontalo	73.50	96.05	56.39	73.32
6	Sumsel	72.52	95.42	56.07	69.83
7	Kalbar	72.38	98.29	53.46	69.85
8	Kaltim	72.31	98.22	54.78	67.57
9	NTT	71.64	95.55	51.46	73.63
10	Jawa Barat	71.07	85.84	68.48	56.61
11	Jambi	71.00	95.86	50.41	72.43
12	Sulut	70.94	92.23	58.50	63.91
13	Bali	70.35	93.97	49.82	73.24
14	Maluku	69.07	92.77	52.05	66.30
15	Sulbar	67.99	93.82	53.09	59.15
16	Banten	67.98	95.46	49.47	62.83
17	DIY	67.55	92.15	52.52	60.48
18	Lampung	67.47	90.57	51.81	63.27
19	Maluku Barat	67.21	93.61	46.30	67.23
20	Babel	67.01	96.51	48.29	59.65
21	Kalsel	66.63	68.24	62.63	70.95
22	Jawa Tengah	66.45	86.48	51.85	64.43
23	NAD	66.29	64.42	70.39	62.13
24	Sulteng	66.02	98.51	45.90	57.14
25	Bengkulu	64.76	94.26	54.03	44.70
26	Sultra	64.29	94.66	43.97	58.37
27	Papua	63.80	92.83	43.84	58.97
28	Papua Barat	63.06	93.14	37.09	66.48
29	Jawa Timur	62.49	83.30	50.96	54.64
30	Sulsel	61.48	82.94	42.36	64.88
31	Sumbar	60.29	63.06	53.57	67.48
32	Sumut	60.20	84.16	41.26	60.14
33	NTB	58.12	68.05	47.50	62.48
<b>INDONESIA</b>		<b>67.30</b>	<b>86.97</b>	<b>54.60</b>	<b>62.72</b>

**Tabel 2. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2010**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77.44	92.46	56.19	92.30
2	DIY	74.33	91.24	55.96	82.25
3	Sumsel	73.65	100.00	55.17	69.85
4	Kaltim	73.04	97.79	53.89	72.34
5	Bali	72.44	94.10	51.52	78.43
6	NTT	72.05	95.55	55.89	68.15
7	Riau	71.45	91.02	47.19	85.39
8	Kalteng	71.10	94.51	56.05	65.57
9	Kalsel	70.94	67.74	72.66	72.25
10	Bengkulu	70.78	94.40	64.35	51.29
11	Maluku	69.51	96.22	48.12	69.89
12	Kalbar	69.32	99.17	45.19	70.11
13	Lampung	67.80	94.39	53.90	56.44
14	Papua Barat	67.75	99.84	44.24	64.73
15	Sulbar	67.57	94.48	47.22	66.06
16	Sulteng	66.63	92.19	51.82	58.01
17	Babel	65.94	85.95	48.44	68.57
18	Sulut	65.94	92.98	44.90	65.34
19	Jambi	65.88	85.15	48.14	69.81
20	NAD	65.36	69.98	62.63	63.87
21	Gorontalo	64.97	82.55	51.72	63.90
22	Sumut	63.45	76.64	57.42	56.45
23	Jawa Tengah	63.42	84.83	46.29	63.70
24	Sumbar	63.04	58.34	63.90	67.59
25	Kep. Riau	62.89	87.04	39.80	69.20
26	Banten	60.60	83.17	38.70	66.99
27	Papua	60.26	90.72	31.76	67.22
28	Maluku Barat	59.92	92.59	30.82	65.06
29	Jawa Barat	59.41	74.41	46.74	60.67
30	NTB	58.13	67.22	46.48	65.19
31	Sulsel	56.67	78.19	32.40	68.17
32	Jawa Timur	55.12	78.48	42.06	46.47
33	Sultra	54.79	83.71	30.46	57.06
<b>INDONESIA</b>		<b>63.17</b>	<b>82.53</b>	<b>47.87</b>	<b>63.11</b>

**Tabel 3. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,81	89,94	58,32	93,50
2	Kalteng	76,28	92,56	54,73	90,04
3	Kalbar	74,86	97,15	49,34	87,38
4	Bali	74,20	95,44	50,08	85,79
5	Lampung	74,08	93,14	61,15	70,64
6	NTT	72,34	96,79	47,56	80,97
7	DIY	71,67	87,22	52,35	82,81
8	Bengkulu	71,36	94,10	59,47	61,63
9	Sulut	71,19	98,44	52,86	66,03
10	Kep. Riau	70,78	87,15	56,00	73,66
11	Riau	70,65	83,12	52,90	83,18
12	Jambi	70,46	91,62	46,27	82,27
13	Maluku	68,38	90,70	46,14	75,61
14	Sumsel	67,92	84,05	49,41	77,05
15	Banten	67,37	80,41	44,57	87,18
16	Babel	67,13	88,27	47,11	72,33
17	Kalsel	66,47	56,33	64,25	82,76
18	Kaltim	66,37	91,84	45,12	68,10
19	Sulbar	66,36	94,80	42,65	68,26
20	Jawa Barat	66,18	78,92	46,42	81,55
21	Sumut	66,15	79,23	59,47	60,31
22	Jawa Tengah	65,59	84,05	46,29	73,04
23	Sulsel	65,31	80,97	39,33	86,87
24	Sumbar	65,02	60,57	59,21	79,83
25	Sulteng	64,00	92,23	37,01	71,36
26	Gorontalo	62,77	81,80	44,36	68,08
27	Papua Barat	61,78	93,59	43,99	50,03
28	Maluku Barat	59,17	90,04	32,61	62,56
29	Papua	59,05	87,73	29,43	70,04
30	Sultra	57,56	85,81	29,18	67,11
31	Jawa Timur	55,98	71,58	40,32	61,23
32	NAD	55,54	58,65	47,90	63,77
33	NTB	54,49	55,45	49,60	61,06
<b>INDONESIA</b>		<b>65,48</b>	<b>80,79</b>	<b>47,54</b>	<b>74,72</b>

**Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2012**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,72	88,11	62,52	88,81
2	Sulut	76,50	95,64	58,65	80,77
3	Sumsel	73,17	93,26	55,21	76,42
4	DIY	72,96	87,39	55,52	82,52
5	NTT	72,67	91,06	50,89	84,15
6	Lampung	72,26	94,14	50,60	79,16
7	Bali	71,75	94,18	45,00	86,01
8	Kaltim	71,23	97,16	51,69	69,68
9	Babel	69,37	83,09	51,21	80,97
10	Jambi	68,81	86,23	46,60	82,18
11	Sulsel	68,55	87,07	43,74	84,66
12	Riau	67,00	80,21	47,16	81,89
13	Maluku Barat	66,83	88,15	50,13	66,55
14	Kalteng	65,78	68,44	51,05	85,82
15	Papua Barat	65,70	94,42	45,74	61,27
16	Kep. Riau	65,61	82,68	49,98	68,95
17	Kalbar	65,38	92,37	37,18	76,23
18	Banten	65,29	79,20	51,03	70,42
19	Sulteng	64,97	93,43	37,65	72,55
20	Jawa Tengah	63,79	75,03	46,29	77,46
21	Sulbar	63,65	88,67	35,92	76,22
22	Bengkulu	61,70	77,76	48,93	61,79
23	Kalsel	61,13	49,51	52,59	89,33
24	Sumbar	60,82	57,10	50,85	81,32
25	Papua	60,71	91,11	32,99	66,50
26	Maluku	59,68	76,05	45,08	62,27
27	Gorontalo	59,37	73,25	50,76	55,59
28	Sumut	58,51	73,85	49,82	53,01
29	NTB	57,97	58,31	49,60	70,85
30	Sultra	57,26	91,39	29,50	58,44
31	Jawa Barat	57,05	65,93	46,58	62,51
32	Jawa Timur	54,99	80,97	36,17	52,22
33	NAD	54,02	60,16	47,16	57,21
<b>INDONESIA</b>		<b>62,63</b>	<b>77,94</b>	<b>46,33</b>	<b>69,28</b>

**Tabel 5. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	Sumut	58,80	73,65	49,50	54,90
2	Sumsel	67,12	91,45	50,32	63,22
3	Sumbar	54,11	54,88	38,97	77,17
4	Sulut	73,11	92,44	62,55	65,56
5	Sultra	52,61	84,32	28,95	50,32
6	Sulteng	64,50	90,03	36,78	76,44
7	Sulsel	65,20	81,30	50,62	68,10
8	Sulbar	64,02	88,51	44,05	64,94
9	Riau	68,37	77,71	52,19	82,32
10	Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26
11	Papua	60,92	90,21	31,37	71,01
12	NTT	73,29	95,59	58,83	68,23
13	NTB	57,22	59,68	49,60	66,24
14	NAD	63,56	71,78	48,59	76,97
15	Maluku Barat	64,06	83,67	48,94	63,40
16	Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95
17	Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58
18	Kep. Riau	66,50	80,08	49,63	76,21
19	Kaltim	68,13	92,14	55,36	58,20
20	Kalteng	64,15	81,89	50,69	63,21
21	Kalsel	63,71	58,03	56,35	82,54
22	Kalbar	67,52	97,54	49,36	58,61
23	Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10
24	Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89
25	Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05
26	Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34
27	Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22
28	DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69
29	DIY	72,36	90,78	50,65	83,69
30	Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28
31	Banten	69,79	81,39	51,03	85,00
32	Bali	72,22	92,55	52,87	77,38
33	Babel	68,79	85,16	50,60	77,09
<b>INDONESIA</b>		<b>63,72</b>	<b>79,00</b>	<b>46,25</b>	<b>72,14</b>

**Tabel 6. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2014**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	84,70	91,72	73,94	92,97
2	Sulut	83,94	93,56	80,89	76,68
3	DIY	82,71	86,25	76,07	88,82
4	Kalbar	80,58	98,44	63,12	85,84
5	Kalteng	79,00	92,93	66,42	81,48
6	Kaltim	77,77	93,28	70,42	69,94
7	Jawa Tengah	77,44	87,87	67,08	80,77
8	Sulbar	76,69	90,22	63,64	80,39
9	Bali	76,13	92,16	61,27	79,56
10	Banten	75,50	81,10	63,68	87,22
11	Babel	75,32	89,80	56,48	87,01
12	Sulsel	75,30	86,27	73,99	63,58
13	Sumsel	74,82	86,09	63,57	78,53
14	Sulteng	74,36	86,56	59,01	83,42
15	Gorontalo	73,82	82,19	63,67	79,41
16	Maluku	72,72	90,85	60,03	70,09
17	NAD	72,29	69,76	63,94	88,73
18	Bengkulu	71,70	79,49	63,98	74,16
19	Lampung	71,62	72,06	63,69	83,66
20	Jawa Barat	71,52	83,95	65,22	65,89
21	Jambi	71,15	78,23	54,01	89,48
22	Kalsel	70,84	58,43	76,45	77,53
23	Jawa Timur	70,36	81,62	56,29	78,54
24	Sultra	70,13	90,89	53,20	70,92
25	NTT	68,81	85,92	65,13	53,12
26	Riau	68,40	74,35	59,74	74,69
27	Kep. Riau	68,39	82,47	58,35	66,61
28	Sumut	68,02	79,86	61,97	62,75
29	Maluku Barat	67,90	76,90	60,61	68,16
30	Papua Barat	65,65	97,93	39,29	66,93
31	Sumbar	63,99	47,21	61,82	88,56
32	NTB	62,62	58,73	62,08	68,38
33	Papua	62,15	85,69	42,51	63,75
<b>INDONESIA</b>		<b>73,04</b>	<b>82,62</b>	<b>63,72</b>	<b>75,81</b>

**Tabel 7. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2015**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	85,32	89,64	83,19	83,26
2	DIY	83,19	90,41	77,98	82,38
3	Kaltim	81,24	93,07	82,74	63,99
4	Kalut	80,16	98,10	83,65	52,05
5	Bali	79,83	94,42	77,42	65,31
6	Sumsel	79,81	96,06	78,79	61,00
7	Sulut	79,40	86,71	77,92	72,53
8	NTT	78,47	93,19	71,69	70,73
9	Jawa Timur	76,90	85,26	67,44	81,39
10	Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81
11	Sulteng	76,67	94,60	68,85	66,53
12	Kalbar	76,40	96,81	65,57	67,95
13	Kalsel	74,76	54,15	85,77	83,17
14	Bengkulu	73,60	78,50	68,45	75,61
15	Kalteng	73,46	85,07	68,31	67,05
16	Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	51,37
17	Babel	72,31	81,25	66,95	69,60
18	Jambi	70,68	75,89	62,12	77,72
19	Kep. Riau	70,26	80,16	65,01	66,13
20	Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	61,48
21	Sultra	69,44	91,14	56,95	61,99
22	Sumut	69,01	82,02	62,17	63,52
23	Banten	68,46	74,28	63,72	68,66
24	Sulbar	68,25	81,88	61,16	62,37
25	Sulsel	67,90	69,38	64,25	71,84
26	NAD	67,78	74,81	63,98	64,97
27	Sumbar	67,46	52,99	69,77	82,01
28	Lampung	65,95	71,99	63,19	62,74
29	Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43
30	Riau	65,83	66,46	66,61	63,80
31	NTB	65,08	51,59	61,11	88,36
32	Maluku Barat	61,52	73,53	61,00	47,25
33	Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81
34	Papua	57,55	82,72	41,81	50,87
<b>INDONESIA</b>		<b>72,82</b>	<b>80,30</b>	<b>70,63</b>	<b>66,87</b>

**Tabel 8. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2016**

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DIY	85,58	90,00	81,59	86,37
2	Babel	83,00	87,65	81,09	80,20
3	NTT	82,49	96,25	81,68	66,46
4	Sumsel	80,95	91,17	81,94	66,53
5	Bali	78,95	96,94	69,60	71,18
6	Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13
7	Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42
8	Kalut	76,98	100,00	66,64	64,48
9	Sulut	76,34	96,31	70,42	60,62
10	Kalbar	75,28	83,29	75,70	64,54
11	Kalteng	74,77	84,98	70,66	68,43
12	Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01
13	Kaltim	73,64	78,25	78,35	60,36
14	Kalsel	73,43	61,04	83,58	72,89
15	Maluku Barat	73,27	92,27	61,79	67,59
16	Kep. Riau	72,84	85,43	71,28	59,48
17	NAD	72,48	92,92	63,94	60,33
18	Sulbar	72,37	82,89	69,02	64,47
19	Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63
20	Sulteng	72,20	80,39	67,89	68,76
21	Riau	71,89	71,78	77,98	62,34
22	Banten	71,36	83,47	68,30	60,99
23	Sultra	71,13	88,07	55,51	74,66
24	DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19
25	Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58
26	Sulsel	68,53	75,54	61,51	70,86
27	Sumut	67,37	82,71	62,29	56,13
28	Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79
29	Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69
30	NTB	65,41	65,06	62,08	71,13
31	Papua	61,02	92,15	41,13	53,45
32	Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31
33	Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85
34	Sumbar	54,41	51,01	54,33	58,82
<b>INDONESIA</b>		<b>70,09</b>	<b>76,45</b>	<b>70,11</b>	<b>62,05</b>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://ntt.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124

E-mail: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)

Web site: <http://ntt.bps.go.id>

ISSN 2528-2131



9 772528 213002 >